



Pemkab.
Tasikmalaya

RENJA BPKPD



Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

**T.A
2025**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V

Telp. (0265) 543504

Fax. (0265) 543505

Kode Pos 46415

SINGAPARNA

Website : bpkpd.tasikmalayakab.go.id

email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505

Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id

SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : RC.04.02/KEP.41/BPKPD/2024

LAMPIRAN :

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja BPKPD Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
 15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
 18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;
27. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 006 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
28. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025; dan
 2. Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 22 APRIL 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,


Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505

Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id

SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : RC.04.02/Kep.53/BPKPD/2024
LAMPIRAN :

TENTANG

RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;
27. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 006 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
28. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya..

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 29 Juli 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Drs. H. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : RC.04.02/KEP.41/BPKPD/2024
TANGGAL : 22 APRIL 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

- Penanggung jawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
- Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda
- Anggota : Kepala Bidang Aset Daerah
- : Kepala Bidang Anggaran
- : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- : Kepala Bidang Perbendaharaan
- : Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah
- : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
- : Perencana Ahli Pertama
- : Staff Fungsional Umum PEP

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Renja BPKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun yang digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Daerah. dengan sistematika: Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan serta Penutup. Dalam Renja BPKPD Tahun 2025, BPKPD direncanakan melakukan **“Optimalisasi PAD melalui Implementasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah”** didukung oleh 4 Program 13 Kegiatan dan 69 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 824.825.192.160,00.

Dokumen ini disusun sebagai perwujudan komitmen seluruh elemen BPKPD untuk mencapai tujuan BPKPD yaitu **Meningkatnya**

Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima. Diharapkan dokumen ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan arah pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan satu tahun kedepan sehingga menghasilkan perencanaan yang baik dan bertanggungjawab dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen Renja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan sehingga pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tasikmalaya, 29 Juli 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I..... 1-1

PENDAHULUAN..... 1-1

 1.1 Latar Belakang.....1-1

 1.2 Landasan Hukum.....1-3

 1.3 Maksud dan Tujuan.....1-6

 1.4 Sistematika Penulisan.....1-7

BAB II.....2-1

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH.....2-1

TAHUN LALU.....2-1

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.....2-1

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....2-15

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....2-22

 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....2-26

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....2-38

BAB III 3-1

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 3-1

 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....3-1

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....3-4

BAB IV..... 4-1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1

BAB V PENUTUP..... 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel T-C29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024..... 2-3

Tabel T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapat Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2-19

Tabel T-C 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 2-27

Tabel 2.1 Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 Dari Pemangku Kepentingan Kabupaten Tasikmalaya 2 -38

Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran BPKPD..... 3-7

Tabel 3.2 Tujuan BPKPD..... 3-8

Tabel 3.3 Sasaran BPKPD..... 3-8

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama BPKPD..... 3-9

Tabel 4.1 Sasaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan..... 4-3

Tabel 4.2 Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan..... 4-6

Tabel T-C 33 Rumusan Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan BPKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026..... 4-11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun, serta sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebagai salah satu perangkat daerah yang mendukung ketercapaian sasaran pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kewajiban menyusun dokumen Renja Tahun 2025. Dokumen Renja PD berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah memuat antara lain Isu strategis Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, rencana kerja tahun 2025 yang didukung oleh pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta informasi penting lainnya. Sebagaimana tertuang dalam pedoman penyusunan Renja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru demi tercapainya sasaran pada Renstra PD. Masalah dan dinamika yang dihadapi menjadi acuan perumusan

dalam penyusunan rancangan Renja PD sehingga dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya dengan dilakukannya implementasi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Tujuan perumusan UU HKPD antara lain untuk mendorong pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan efisien; mewujudkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; dan mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. UU HKPD ini berisi ketentuan anggaran, ketentuan fiskal dan retribusi daerah. UU HKPD ini akan menyederhanakan jenis pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang saat ini diatur dalam UU No 28 Tahun 2009. UU HKPD juga menjadi sarana untuk mengatur desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang akuntabel dan berkinerja.

Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam UU HKPD antara lain: 1) Penyederhanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2) Perubahan ketentuan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), 3) Pengenalan skema opsen pajak untuk PKB dan BBNKB. Dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah serta penerimaan PAD di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan inovasi-inovasi dalam setiap penyelenggaraan program kegiatan. Inovasi yang rencananya akan dilakukan oleh BPKPD pada Tahun Anggaran 2025 untuk dapat mengatasi isu tersebut yaitu optimalisasi pelayanan pajak daerah, salah satunya melalui digitalisasi pelayanan untuk opsen PKB dan BBNKB, melakukan pengadaan

mobil pelayanan keliling serta pemanfaatan aset daerah yang diharapkan dapat membantu peningkatan PAD di Kabupaten Tasikmalaya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;
27. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 006 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
28. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021–2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pencapaian kinerja BPKPD yang didukung oleh pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun, Renja digunakan sebagai bahan pendukung penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) yang selanjutnya untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA Perangkat Daerah) Pemerintah

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja BPKPD Tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Tahun 2021-2026 kedalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk 1 (satu) tahun;
2. Sebagai pedoman bagi aparatur BPKPD Kabupaten Tasikmalaya dalam mencapai tujuan dengan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025;
4. Memecahkan masalah yang dihadapi serta menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKPD KAB. TASIKMALAYA TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu merupakan salah satu upaya untuk mengetahui sampai sejauh mana Perangkat Daerah dapat melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga atas dasar evaluasi tersebut dapat diketahui faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja dan kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Pada tahun 2023 BPKPD melaksanakan 4 program, 12 kegiatan dan 54 sub kegiatan. BPKPD melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan, pendapatan dan aset daerah serta berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat kegiatan yang merupakan unsur PPKD. Total anggaran yang diampu sebesar Rp. 809.728.466.043,00 yang terdiri dari belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD dan PPPK di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 99.750.717.938,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp. 699.196.251.391,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp. 10.781.496.714,00

Penyerapan total anggaran BPKPD pada tahun 2023 sebesar 90,44% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Data Terlampir pada tabel TC-29) dengan realisasi Rp. 732.327.095.840,00 dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 809.728.466.043,00. Untuk keseluruhan penyerapan anggaran telah baik, namun masih terdapat 3 sub kegiatan yang penyerapannya masih rendah (dibawah 80%) diantaranya pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (masih terdapat gaji untuk P3K di Kabupaten Tasikmalaya

yang belum tersalurkan dikarenakan baru akan di lantik pada tahun 2024), sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (tidak ada pengajuan publikasi dari media) dan sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota (masih banyak Desa yang belum melunasi pajak PBB P2 sehingga DBH nya belum dapat tersalurkan). Untuk lebih jelasnya evaluasi Renja sampai Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel TC- 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2024
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4)
5	02				KEUANGAN		5.156.942 .512.645		1.604.381 .225.341		809.728.4 66.043		732.327.0 95.840	90,44		737.703.2 00.417	2.676.749.6 73.618	51,91	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83 Poin	929.027.5 83.833	80 Poin	181.323.0 62.754	81 Poin	99.804.31 7.938	80 Poin	30.069.79 4.920	30,13	82 Poin	27.683.79 6.266	220.646.80 4.175	23,75
						Nilai IKM Perangkat Daerah	87 Poin	45.960.20 0.528	87 Poin	10.334.01 2.492	86,75 Poin	4.698.721 .714	86,76 Poin	4.533.296 .129	96,48	86,80 Poin	7.019.022 .925	19.170.700. 099	41,71
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	388 Dokumen	1.120.729 .900	115 Dokumen	275.587.9 50	96 Dokumen	53600000 ,00	96 Dokumen	53.250.30 0	99,35	96 Dokumen	208.000.0 00	420.874.75 0	37,55

						Kinerja Perangkat Daerah													
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	91 Dokumen	799.347.400	24 Dokumen	210.996.600	26 Dokumen	30.000.000	26 Dokumen	29.748.800	99,16	23 Dokumen	143.000.000	292.936.900	36,65
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	158 Laporan	223.877.500	44 Laporan	41.939.750	-	-	-	-	-	-	-	41.939.750	18,73
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	139 Laporan	97.505.000	47 Laporan	22.651.600	70 Laporan	23.600.000	70 Laporan	23.501.500	99,58	72 Laporan	65.000.000	85.998.100	88,20
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100 Persen	927.906.853.933	100 Persen	181.047.474.804	100 Persen	99750717938,00	100 Persen	30.016.544.620	30,09	100 Persen	27.475.796.266	220.225.929.425	23,73
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 orang/bulan	927.906.853.933	94 orang/bulan	181.047.474.804	95 orang/bulan	99.750.717.938	95,00	30.016.544.620	30,09	95 orang/bulan	27.475.796.266	220.225.929.425	23,73
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100 Persen	2.603.587.100	100 Persen	430.476.912	100 Persen	75.000.000	100 Persen	74.549.429	99,40	100 Persen	447.340.000	891.182.497	34,23
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	168.380.000			0	0,00	0,00	-	-	2 Paket	84.190.000	51.000.000	-
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	882 Orang	2.435.207.100	275 Orang	430.476.912	12 Orang	75.000.000,00	12 Orang	74.549.429	99,40	145 Orang	363.150.000	840.182.497	34,50
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100 Persen	13.355.569.301	100 Persen	3.631.273.699	100 Persen	1.758.463.858	100 Persen	1.680.543.139	95,57	100 Persen	2.711.416.225	6.971.344.175	52,20

5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	282.050.0 00	5 Paket	94.883.17 0	1 Paket	30.006.00 0	1 Paket	30.004.40 5	99,99	1 Paket	30.000.00 0	144.865.075	51,36
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Paket	3.463.250. 309	6 Paket	978.329.3 75	3 Paket	472.805.0 00	3 Paket	464.621.0 29	98,27	3 Paket	640.084.8 00	2.057.720.75 4	59,42
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	15 Paket	420.253.8 82	8 Paket	182.262.8 13	1 Paket	40.000.00 0	1 Paket	38.957.00 0	97,39	1 Paket	39.997.00 0	245.155.013	58,33
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	15 Paket	1.182.300. 000	8 Paket	261.520.0 00	1 Paket	100.000.0 00	1 Paket	99.200.00 0	99,20	1 Paket	350.000.0 00	395.370.000	33,44
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	3.317.076. 150	4 Paket	1.090.203. 024	1 Paket	530.153.8 58	1 Paket	477.028.0 00	89,98	1 Paket	760.169.4 00	2.283.544.92 4	68,84
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	20 Dokumen	712.000.0 00	8 Dokumen	71.320.00 0	4 Dokumen	49.499.00 0	4 Dokumen	35.260.00 0	71,23	4 Dokumen	50.000.00 0	123.640.000	17,37
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	5 Paket	259.797.7 60	2 Paket	79.021.90 0	-	-	-	-	-	-	-	79.021.900	30,42
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60 Laporan	574.080.0 00	24 Laporan	239.200.0 00	4 Laporan	146.000.0 00	4 Laporan	146.000.0 00	100,00	4 Laporan	328.000.0 00	475.245.000	82,78
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	2.498.395. 200	24 Laporan	634.533.4 17	4 Laporan	315.000.0 00	4 Laporan	314.695.7 15	99,90	4 Laporan	488.165.0 25	1.067.704.51 9	42,74
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	446.366.0 00	-	-	1 Dokumen	25.000.00 0	1 Dokumen	24.776.99 0	99,11	1 Dokumen	25.000.00 0	49.076.990	10,99

5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	200.000.000	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	100,00	-		50.000.000	25,00
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100 Persen	10.174.531.937	100 Persen	641.468.500	-	-	-	-	-	-	606.381.900	1.090.025.400	10,71
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	25 Unit	4.005.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	21 Unit	1.131.414.357	4 Unit	197.937.800	-	-	-	-	-	1 Unit	81.690.000	271.797.800	24,02
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	120 Unit	4.631.456.780	30 Unit	403.960.700	-	-	-	-	-	40	524.691.900	778.657.600	16,81
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	405.710.800	1 Unit	39.570.000	-	-	-	-	-	-	-	39.570.000	9,75
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	9.906.920.030	100 Persen	3.208.801.685	100 Persen	1544957714,00	100 Persen	1.496.899.805	96,89	100 Persen	1.664.000.000	5.495.439.938	55,47
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 Laporan	5.660.255.120	24 Laporan	1.897.518.649	12 Laporan	843.994.000	12 Laporan	827.537.357	98,05	12 Laporan	926.000.000	3.098.609.746	54,74

5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Laporan	349.742.000	2 Laporan	124.000.000	1 Laporan	57.000.000	1 Laporan	57.000.000	100,00	1 Laporan	63.000.000	235.000.000	67,19
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 Laporan	3.896.922.910	24 Laporan	1.187.283.036	1 Laporan	643.963.714	1 Laporan	612.362.448	95,09	12 Laporan	675.000.000	2.161.830.192	55,48
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	9.919.592.160	100 Persen	2.421.991.696	100 Persen	1320300142,00	100 Persen	1.281.303.756	97,05	100 Persen	1.589.884.800	4.722.708.089	47,61
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	70 Unit	3.876.624.700	70 Unit	1.212.333.437	70 Unit	650.300.142	70 Unit	614.461.860	94,49	70 Unit	799.990.000	2.164.518.874	55,84
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1.665 Unit	2.423.721.460	666 Unit	926.252.800	143 Unit	285.000.000	143 Unit	282.362.430	99,07	167 Unit	400.000.000	1.529.769.290	63,12
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3.619.246.000	3 Unit	283.405.459	3 Unit	385.000.000	3 Unit	384.479.466	99,86	3 Unit	389.894.800	1.028.419.925	28,42
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	4.126.422.088.024	100 Persen	1.401.619.878.050	100 Persen	701.570.365.391	101,36 Persen	694.172.784.632	98,95	100 Persen	697.591.118.126	2.420.964.644.142	58,67
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	10.150.083.938	100 Persen	3.304.715.948	100 Persen	160253900,00	105,45 Persen	1.589.499.953	99,19	100 Persen	2.175.109.000	5.712.696.105	56,28
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	5 Dokumen	727.478.000	2 Dokumen	196.994.914	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	48.915.321	97,83	1 Dokumen	85.000.000	274.678.195	37,76

5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	5 Dokumen	707.500.0 00	2 Dokumen	180.485.6 15	1 Dokumen	50.000.00 0	1 Dokumen	48.979.97 0	97,96	1 Dokumen	85.000.00 0	239.126.925	33,80
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	298 Dokumen	495.978.0 00	121 Dokumen	182.377.9 71	59 Dokumen	40.000.00 0	59 Dokumen	38.842.95 5	97,11	59 Dokumen	80.000.00 0	221.220.926	44,60
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	298 Dokumen	500.978.0 00	121 Dokumen	183.095.5 18	59 Dokumen	40.000.00 0	59 Dokumen	38.841.45 7	97,10	59 Dokumen	80.000.00 0	221.936.975	44,30
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	298 Dokumen	483.700.0 00	121 Dokumen	147.154.4 60	59 Dokumen	40.000.00 0	59 Dokumen	39.866.12 0	99,67	59 Dokumen	72.500.00 0	254.884.568	52,69
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	298 Dokumen	421.910.0 00	121 Dokumen	166.769.9 86	59 Dokumen	40.000.00 0	59 Dokumen	39.863.90 0	99,66	59 Dokumen	76.000.00 0	206.633.886	48,98
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	1.516.806. 500	4 Dokumen	389.110.7 44	2 Dokumen	210.000.0 00	2 Dokumen	209.410.8 87	99,72	2 Dokumen	169.800.0 00	598.521.631	39,46
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	1.659.425. 000	4 Dokumen	461.160.2 34	2 Dokumen	190.000.0 00	2 Dokumen	189.320.5 50	99,64	2 Dokumen	169.800.0 00	657.007.584	39,59
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	8 Dokumen	411.000.0 00	5 Dokumen	99.989.61 1	5 Dokumen	105.000.0 00	8 Dokumen	104.861.7 40	99,87	4 Dokumen	386.770.0 00	488.175.811	118,78
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	5 Dokumen	2.037.132. 500	2 Dokumen	935.755.2 96	1 Dokumen	430.000.0 00	1 Dokumen	428.737.6 25	99,71	1 Dokumen	586.394.0 00	1.597.535.89 2	78,42
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran	1.192 Orang	1.188.175. 938	804 Orang	361.821.5 99	440 Orang	407.539.0 00	440 Orang	401.859.4 28	98,61	318 Orang	383.845.0 00	952.973.712	80,20

						daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	3.317.482.600	100	660.836.781	100	289675000,00	100,00	289.265.697	99,86	100	531.261.000	1.166.871.433	35,17	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	177 Dokumen	465.499.500	-	-	59 Dokumen	92.875.000	59 Dokumen	92.725.000	99,84	-	-	92.725.000	19,92	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	708 Dokumen	314.999.500	-	-	-	-	-	-	-	239 Dokumen	52.050.000	33.083.000	10,50	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Dokumen	865.041.375	24 Dokumen	282.065.743	12 Dokumen	98.400.000	12 Dokumen	98.158.500	99,75	12 Dokumen	220.000.000	477.415.604	55,19	
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6 Dokumen	314.999.500	-	-	-	-	-	-	-	2	119.211.000	16.259.750	5,16	
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas	60 Dokumen	891.942.975	24 Dokumen	280.444.138	12 Dokumen	98.400.000	12 Dokumen	98.382.197	99,98	12 Dokumen	140.000.000	449.061.179	50,35	

						SP2D dengan Instansi Terkait													
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	1 Dokumen	150.000.0 00	1 Dokumen	98.326.90 0	-	-	-	-	-	-	-	98.326.900	65,55
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota	195 Dokumen	314.999.7 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 Persen	6.416.479 .490	100 Persen	1.316.044 .288	100 Persen	48190000 0,00	100 Persen	454.400.7 05	94,29 Persen	100 Persen	729.300.0 00	2.018.149.4 70	31,45
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	64 Dokumen	938.500.0 00	16 Dokumen	112.005.2 56	16 Dokumen	124.000.0 00	16 Dokumen	116.245.1 11	93,75	16 Dokumen	143.930.0 00	270.042.567	28,77
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawab an pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	85 Laporan	880.038.0 00	34 Laporan	261.377.9 46	17 Laporan	116.900.0 00	17 Laporan	103.226.2 46	88,30	17 Laporan	89.900.00 0	403.222.425	45,82
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan	4 Dokumen	655.000.0 00	1 Dokumen	47.507.63 4	1 Dokumen	50.000.00 0	1 Dokumen	47.014.23 8	94,03	3 Dokumen	132.000.0 00	220.544.771	33,67

						Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi														
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen	1.353.815. 000	4 Dokumen	433.814.0 65	2 Dokumen	150.000.0 00	2 Dokumen	147.869.6 60	98,58	2 Dokumen	177.500.0 00	586.204.870	43,30	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	16 Dokumen	1.011.077. 490	2 Dokumen	243.627.2 26	-	-	-	-	-	-	-	243.627.226	24,10	
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	4 Dokumen	630.000.0 00	2 Dokumen	69.687.68 8	-	-	-	-	-	1 Dokumen	75.000.00 0	69.687.688	11,06	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/ Kota	310 orang	520.049.0 00	180 orang	101.048.7 18	59 orang	41.000.00 0	59 orang	40.045.45 0	97,67	118 orang	55.000.00 0	141.094.168	27,13	
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota yang dibina	160 Lembaga	428.000.0 00	40 Lembaga	46.975.75 5	-	-	-	-	-	40 Lembaga	55.970.00 0	83.725.755	19,56	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitas Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	4.106.538 .041.996	100 Persen	1.396.338 .281.033	100 Persen	69919625 1391,00	100 Persen	691.839.6 18.277	98,95	100 Persen	694.155.4 48.126	2.412.066.9 27.134	58,74	

5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	60 Laporan	3.815.124.788.867	24 Laporan	1.332.890.619.600	12 Laporan	655.087.943.000	12 Laporan	652.146.914.700	99,55	12 Laporan	650.021.869.000	2.306.514.619.100	60,46
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	5 Laporan	233.897.874.625	2 Laporan	46.525.537.433	1 Laporan	31.458.863.083	1 Laporan	30.279.044.577	96,25	1 Laporan	30.000.000.000	78.574.287.034	33,59
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	5 Laporan	57.515.378.504	2 Laporan	16.922.124.000	1 Laporan	12.649.445.308	1 Laporan	9.413.659.000	74,42	1 Laporan	14.133.579.126	26.978.021.000	46,91
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	89 Persen	8.725.325.000	81 Persen	1.515.100.672	83 Persen	624000000,00	84,68 Persen	610.273.240	Persen 97,80	83 Persen	956.202.100	2.425.614.153	27,80
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	8.725.325.000	100 Persen	1.515.100.672	100 Persen	624000000,00	100 Persen	610.273.240	97,80	100 Persen	956.202.100	2.425.614.153	27,80
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	8 Dokumen	1.300.295.705	2 Dokumen	301.754.240	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	68.723.840	98,18	2 Dokumen	131.267.000	379.713.080	29,20
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	10 Dokumen	310.000.000	8 Dokumen	47.997.385	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	29.918.400	99,73	2 Dokumen	44.835.100	83.776.385	27,02
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	600.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	21 Laporan	1.975.088.225	8 Laporan	794.673.425	4 Laporan	277.000.000	4 Laporan	265.906.000	95,99	4 Laporan	526.100.000	1.181.529.866	59,82
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah;	6 Dokumen	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	60 laporan	1.068.000.000	24 laporan	224.245.932	59 laporan	247.000.000	59 laporan	245.725.000	99,48	12 laporan	254.000.000	634.165.132	59,38
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kab/Kota	329 Orang	1.971.941.070	60 Orang	146.429.690	-	-	-	-	-	-	-	146.429.690	7,43
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100 Persen	46.807.315.260	100 Persen	9.589.171.373	100 Persen	3031061000,00	100 Persen	2.940.946.919	97,03	100 Persen	4.453.061.000	13.541.911.049	28,93
5	02	04	2.01		Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100 Persen	46.807.315.260	100 Persen	9.589.171.373	100 Persen	3031061000,00	100 Persen	2.940.946.919	97,03	100 Persen	4.453.061.000	13.541.911.049	28,93
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	8 Laporan	860.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	276.280.000	29.972.003	3,49
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	1.800.000.000	1 Dokumen	96.920.570	1 Dokumen	164.641.000	1 Dokumen	164.541.696	99,94	2 Dokumen	591.280.000	305.626.637	16,98
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	16 Laporan	1.860.000.000	4 Laporan	141.407.835	4 Laporan	84.000.000	4 Laporan	83.911.442	99,89	4 Laporan	100.000.000	266.701.275	14,34
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	34 Unit	6.806.923.200	12 Unit	2.731.812.578	6 Unit	1.311.000.000	6 Unit	1.303.476.830	99,43	7 Unit	1.881.000.000	4.416.894.123	64,89
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek	12 Laporan	3.112.900.000	8 Laporan	250.126.909	1 Laporan	54.070.000	1 Laporan	53.976.504	99,83	4 Laporan	96.280.000	327.835.873	10,53

						pajak dan Wajib pajak daerah													
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	1.285.969 OP	16.051.415.000	300.958 OP	2.797.159.457	-	-	-	-	-	-	-	2.797.159.457	17,43
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	5 Layanan	3.933.806.240	13 Layanan	1.405.134.120	12 Layanan	514.520.000	12 Layanan	514.234.592	99,94	12 Layanan	512.550.000	2.241.341.922	56,98
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	24 Dokumen	500.000.000	-	-	12 Dokumen	38.256.000	12 Dokumen	38.185.000	99,81	12 Dokumen	43.256.000	45.539.000	9,11
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	60 Dokumen	5.803.351.750	24 Dokumen	1.351.336.772	12 Dokumen	764.000.000	12 Dokumen	682.411.633	89,32	12 Dokumen	843.970.000	2.170.287.405	37,40
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	20 Dokumen	4.578.919.070	8 Dokumen	815.273.132	4 Dokumen	100.574.000	Dokumen 4	100.209.222	99,64	4 Dokumen	108.445.000	940.553.354	20,54
Total							100	5.156.942.512.645	101,63	1.604.381.225.341		809.728.466.043		732.327.095.840	90,44	100	737.703.200.417	2.676.749.673.618	51,91

Sumber : *BPKPD, diolah*

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan, yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Renstra BPKPD Tahun 2021-2026 tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Meningkatnya tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima dengan indikator tujuan;

- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun sasaran dalam tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah** dengan indikator sasaran;
 - Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah
2. **Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel** dengan indikator sasaran;
 - Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. **Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel** dengan indikator sasaran;
 - Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan
4. **Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah** dengan indikator sasaran;
 - Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator sasaran Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar 61,36 "cukup baik" sehingga capaian kinerja yang diraih oleh BPKPD pada tahun 2023 sebesar 94,4% dari target yang telah ditetapkan dengan nilai 65. Untuk penilaian RB Tahun 2023 terdapat perubahan aturan yang sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kemudian dirubah oleh pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Nilai Reformasi Birokrasi BPKPD pada tahun 2023 ditargetkan dapat tercapai sebesar 69. Berdasarkan Hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Tim Asesor Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Independen Provinsi Jawa Barat nilai RB BPKPD Tahun 2023 adalah 78,07 Dengan Kategori Baik. Meskipun terdapat kendala dalam persiapan penilaian RB di tahun 2023 karena penilaian yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. BPKPD dapat meningkatkan nilai RB dari tahun sebelumnya, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. jika dibandingkan dengan target akhir renstra dengan nilai 81 maka capaian realisasi sampai tahun ketiga renstra sudah terealisasi 96,38%.

Sasaran mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator sasaran Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah mencapai 100% sejak tahun pertama Renstra yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra, persentase capaian tahun 2023 adalah 100%.

Sasaran mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel dengan indikator sasaran persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan dihitung dari perbandingan antara total aset berupa tanah dan kendaraan dibandingkan dengan total aset (tanah dan kendaraan) yang memiliki bukti kepemilikan yang sah. Berdasarkan data jumlah aset (tanah dan kendaraan) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya per 30 Desember 2023 sebanyak 3.923 dan yang telah memiliki kepemilikan yang sah sebanyak 3.322. Sehingga persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan sebesar 84,68% atau dengan capaian kinerja sebesar 102,02% dari target tahun 2023 sebesar 83%. Nilai pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 80,77%.

Sasaran meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2023 ditargetkan tumbuh sebesar 5,11%. Persentase pertumbuhan pajak daerah tahun 2023 berdasarkan LRA *Audited* menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 94.355.650.449,00. Penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp. 98.097.622.047,00 tercapai sebesar 95,75% dari target penerimaan pajak yaitu Rp. 102.450.000.000,00. Apabila dilihat dari target pertumbuhan pajak tahun 2023 sebesar 5,11% sedangkan yang terealisasi hanya 3,97 % sehingga persentase ketercapaian memperoleh 77,61% hasil capaian kinerja tersebut dihitung dari $((\frac{3,97}{5,11} \times 100) = 77,61\%)$. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja BPKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Realisasi indikator kinerja persentase pertumbuhan pajak ini tidak melampaui dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

1. Belum optimalnya sosialisasi dari Pemerintah kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) mengenai pentingnya

membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila WP melalaikan kewajibannya;

2. Daya beli masyarakat yang masih rendah;
3. *Database* yang belum lengkap dan akurat;
4. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola pajak;
5. Lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan; dan
6. Pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas.

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja BPKPD sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator (IKU/ SPM/ IKK/ SDG's)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	78,019	79	80	81	70,144	79	80	81	Indikator Tujuan
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	69	78,25	78,50	78,75	78,070	78,25	78,50	79	IKU PD
3	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100,000	100	100	100	IKU PD
4	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	83	86	89	90	84,680	86	89	90	IKU PD
5	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	5,11	5,18	5,24	5,30	3,966	5,18	5,24	5,30	IKU PD

6	Persentase PAD	%	10,8	10,91	11,01	11,01	9,491	10,91	11,01	11,01	IKD
7	Opini BPK	Interprestasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
8	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Interprestasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
9	Persentase SILPA	%	2,44	2,19	1,94	1,69	4,379	2,19	1,94	1,69	IKD
10	Persentase SILPA	%	2,44	2,19	1,94	1,69	4,379	2,19	1,94	1,69	IKD
11	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	IKD
12	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	4,59	4,49	4,39	4,29	8,293	4,49	4,39	4,29	IKD
13	Rasio PAD	%	1,24	1,32	1,41	1,51	0,744	1,32	1,41	1,51	IKD
14	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	60	61	62	63	64,523	61	62	63	IKD
15	Opini Laporan Keuangan	Interprestasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
16	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	13,54	13,44	13,34	13,24	1,513	13,44	13,34	13,24	IKD
17	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	7,91	7,81	7,71	7,61	13,826	7,81	7,71	7,61	IKD
18	Manajemen Aset		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	IKD

19	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	1,67	1,52	1,38	1,26	4,559	1,52	1,38	1,26	IKD
20	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya ==> pendapatan pemerintah/pdb	%	1,24	1,32	1,41	1,51	0,744	1,32	1,41	1,51	IKD
21	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB ==> pajak daerah/pdb	%	0,25	0,27	0,28	0,30	0,230	0,27	0,28	0,30	IKD

Sumber : BPKPD, diolah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022, dimana BPKPD mempunyai tugas yang strategis pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yakni sebagai pengelola keuangan yang berwenang dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah, perencanaan dan penetapan pendapatan daerah, pembinaan pengembangan dan penagihan pendapatan, dan unit pelaksana teknis. Namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKPD pada Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Masih terdapat 217 bidang tanah yang belum tersertifikasi, hal tersebut dikarenakan terdapat aset tanah/bangunan yang belum *clear and clean* serta kesulitan dalam penyediaan kelengkapan dokumen untuk proses pensertifikatan;
3. Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
4. Implementasi sistem pada pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah belum dapat berjalan secara optimal;
5. Belum optimalnya perencanaan, pengawasan dan penegakan hukum mengenai pajak dan retribusi daerah;

6. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik mengharuskan BPKPD selalu melakukan perbaikan mutu produk layanan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

BPKPD selaku perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang bertindak dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan, memiliki isu penting yang harus segera diselesaikan. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu-isu yang perlu mendapat perhatian pada BPKPD diidentifikasi sebagai berikut:

1. Implementasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Penilaian dan pemanfaatan Aset Daerah yang *idle* belum optimal;
4. Perberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing pada Tahun 2025.

Arah Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, dalam rangka menindaklanjuti isu strategis yang dihadapi serta untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pajak daerah melalui *intensifikasi* dan *ekstensifikasi*, yaitu dengan cara :
 - a. Melakukan kegiatan pemutahiran data NJOP PBB P2 sesuai dengan harga pasar wajar (ZNT);
 - b. Pendataan/pemuktahiran objek dan subjek pajak daerah;
 - c. Pemeliharaan database wajib pajak;
 - d. Sinkronisasi Program/kegiatan bersama samsat dari opsen PKB dan BBNKB;
 - e. Meningkatkan pelayanan untuk opsen PKB dan BBNKB.
2. Melakukan pemanfaatan aset daerah yang *idle* bekerjasama dengan KPKNL
 - a. Kajian terkait aset daerah yang akan dimanfaatkan telah dilakukan oleh Bappelitbangda dengan melibatkan akademisi, namun kajian tersebut belum bisa ditindaklanjuti karena masih bersifat umum/teoritis. Dimana seharusnya kajian tersebut memakai kajian dengan penilaian HBU (*High Best Use*) sehingga dapat mengetahui dengan jelas nilai aset tertinggi. Analisis HBU meliputi empat hal pokok yaitu, analisis kelayakan secara fisik (*physically feasible*), analisis kelayakan secara peraturan (*legally permissible*), analisis kelayakan secara keuangan (*financially feasible*), dan analisis produktivitas yang maksimal (*maximally productive*). Lazimnya, analisis

- HBU dalam konteks optimalisasi aset dilaksanakan lebih detail dibandingkan dalam konteks penilaian aset.
- b. Melakukan kerjasama dengan DPMPTSP untuk mencari investor yang akan melakukan pemanfaatan aset
3. Melakukan digitalisasi terhadap pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Penggunaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Penerapan ETPD diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi ETPD dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Meningkatkan literasi kepada masyarakat mengenai pembayaran non tunai;
 - b. Mendorong Perangkat Daerah penghasil pajak dan retribusi daerah agar seluruh transaksi yang dilakukan dapat secara non tunai;
 - c. Kanal yang mendukung ETPD telah disiapkan di tahun 2024;
 - d. Menyelenggarakan *event* pembayaran melalui digital.
 4. Optimalisasi penerimaan piutang pajak daerah yaitu melakukan kerjasama dengan APH;
 5. Mengoptimalkan pensertifikatan bidang tanah/bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 6. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah, BLUD dan *stakeholder* lainnya dalam penyajian dan penyusunan dokumen perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan Daerah;
 7. Meningkatkan pelayanan prima di internal Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD ini, BPKPD harus melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan atau belum sesuai. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Renja BPKPD Tahun 2025 terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 6.434.225.476,00. Penambahan tersebut untuk sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sehingga pengelolaan aset khususnya dalam pemanfaatan aset yang *idle* dapat berjalan dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan pajak daerah.

Serta dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang HKPD, bahwa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Tasikmalaya dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Dengan dikembalikannya Opsen PKB dan BBNKB, maka Perlu adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelayanan tersebut. Untuk lebih rinci, disajikan dalam Tabel T-C 31 :

Tabel T-C 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Tasikmalaya

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode					Rancangan Awal RKPD					Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5	02	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83 Poin	25.649.021.039	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83 Poin	25.649.021.039	
							Nilai IKM Perangkat Daerah	87 Poin	8.280.252.925			Nilai IKM Perangkat Daerah	87 Poin	9.654.478.591	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101 Dokumen	233.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101 Dokumen	233.000.000	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29 Dokumen	173.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29 Dokumen	173.000.000	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72 Laporan	60.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72 Laporan	60.000.000	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100 %	25.416.021.039	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100 %	25.416.021.039	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/bulan	25.416.021.039	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/bulan	25.416.021.039	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Desa Sukaasih	Cakupan Peningkatan	100 %	679.190.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Desa Sukaasih	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100 %	651.717.800	

						Kec. Singaparna	Kapasitas ASN BPKPD				Kec. Singaparna				
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	84.190.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	87.425.800	
5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	200.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	169.292.000	
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	153 Orang	395.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	153 Orang	395.000.000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	2.711.416.225	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	2.696.417.608	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.001.000	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	640.084.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	640.084.580	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39.997.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39.997.603	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	350.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	350.000.000	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	760.169.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	710.017.400	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	50.000.000	

5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	328.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	328.000.000	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	488.165.025	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	488.165.025	
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	60.152.000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100 %	1.610.761.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100 %	2.173.899.900	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.004.380.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.004.380.000	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	81.690.000	Pengadaan Mebel	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	431.690.000	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	524.691.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	737.829.900	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.689.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.689.010.000	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	926.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	926.010.000	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	88.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	88.000.000	

5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	675.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	675.000.000	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.589.884.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.443.433.283	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	799.990.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	799.990.000	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	143 Unit	400.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	143 Unit	404.118.483	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit	389.894.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.239.324.800	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	773.153.342.720	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	773.153.342.530	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	2.323.356.190	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	2.323.356.000	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	104.500.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	104.500.000	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	104.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	104.500.000	
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	80.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	80.000.000	

5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	80.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	80.000.000	
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	72.500.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	72.500.000	
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	76.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	76.000.000	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	220.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	220.000.000	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	220.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	220.000.000	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	386.770.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	386.770.000	
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	586.394.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	586.394.000	
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	318 Orang	392.692.190	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	318 Orang	392.692.000	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	622.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	622.000.000	

5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	55.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	55.000.000	
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	236 Dokumen	57.000.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	236 Dokumen	57.000.000	
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	220.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	220.000.000	
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	110.000.000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	110.000.000	
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	180.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	180.000.000	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	1.092.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	1.092.000.000	

5	02	0 2	2. 03	00 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen	173.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen	173.000.000	
5	02	0 2	2. 03	00 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	16 Laporan	121.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	16 Laporan	121.000.000	
5	02	0 2	2. 03	00 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	172.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	172.000.000	
5	02	0 2	2. 03	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	234.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	234.000.000	
5	02	0 2	2. 03	00 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	110.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	110.000.000	
5	02	0 2	2. 03	10 00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	98.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	98.000.000	

5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	128 Orang	92.000.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	128 Orang	92.000.000	
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	41 Lembaga	92.000.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	41 Lembaga	92.000.000	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Fasilitas Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	769.115.986.530	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Fasilitas Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	769.115.986.530	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	720.596.737.300	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	720.596.737.300	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	34.604.859.391	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	34.604.859.391	
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	13.914.389.839	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	13.914.389.839	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	89 %	1.797.400.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	89 %	2.767.400.000	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	1.797.400.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	2.767.400.000	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	140.000.000	Penyusunan Standar Harga	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	140.000.000	
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	60.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	60.000.000	

5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	768.700.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	768.700.000	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	418.700.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1.388.700.000	
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	285.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	285.000.000	
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	59 Orang	125.000.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	59 Orang	125.000.000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100 %	9.510.950.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100 %	13.600.950.000	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100 %	9.510.950.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100 %	13.600.950.000	
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	363.700.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	241.000.000	
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	756.750.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	143.960.000	

5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	137.500.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	742.790.000	
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	1.813.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	2.353.000.000	
5	02	04	2.01	0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	545.000.000	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	1.125.000.000	
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	220.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	300.000.000	
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	376.400 Obyek Pajak	2.475.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	376.400 Obyek Pajak	4.820.000.000	
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	725.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	875.000.000	
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	125.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	125.000.000	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	950.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	1.400.000.000	

5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	1.100.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	1.175.200.000	
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	300.000.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	300.000.000	
Jumlah									818.390.966.684					824.825.192.160	

Sumber : *BPKPD, diolah*

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai amanat Permendagri nomor 86 Tahun 2017 pasal 6 ayat 6 bahwa rencana pembangunan daerah harus bersifat partisipatif yakni merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

BPKPD Kabupaten Tasikmalaya telah memfasilitasi usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat melalui kegiatan forum Perangkat Daerah BPKPD. Forum Perangkat daerah telah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari Tahun 2024 melalui media daring dan luring. Namun berdasarkan kegiatan tersebut tidak terdapat usulan dari seluruh *stakeholder* yang hadir terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan BPKPD Tahun 2025.

Tabel 2.1
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025
Dari Pemangku Kepentingan Kabupaten Tasikmalaya

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada tahun 2025 merupakan tahun transisi, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengusulkan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2025 untuk Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi struktural untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Pemahaman atas konteks ekonomi makro dan arah serta strategi kebijakan fiskal dibutuhkan untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi tinggi diupayakan dengan mengatasi berbagai binding constraints pembangunan, yang mencakup tantangan di bidang sumber daya manusia, Infrastruktur, serta kualitas regulasi dan birokrasi, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, namun juga bersifat inklusif dan berkelanjutan.

UU HKPD mengamanatkan untuk melakukan sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan menjaga kesinambungan fiskal. Sinergi tersebut salah satunya melalui penyelarasan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Beberapa arah dan strategi kebijakan tersebut adalah pengembangan multipolar strategy antara lain peningkatan investasi daerah, pemerataan layanan publik daerah, penurunan

kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, pengembangan sentra-sentra ekonomi, dan penguatan daerah afirmasi. Untuk mendukung implementasi strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD perlu terus ditingkatkan dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui kebijakan TKD yang asimetris, optimalisasi PAD (*collecting more*), perbaikan belanja yang lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel (*spending better*), pengendalian defisit APBD, dan penguatan akses pembiayaan (*innovative financing*).

Arah kebijakan Belanja K/L tahun 2025 difokuskan antara lain sebagai berikut: 1. Kebijakan Umum Belanja K/L

- a. Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel yang disertai dengan penguatan reformasi fiskal dengan menjaga keseimbangan antara upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan dengan upaya pengendalian risiko dalam rangka mendukung berbagai agenda pembangunan;
- b. Belanja K/L TA 2025 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang difokuskan untuk penguatan strategi jangka menengah melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan inklusivitas, hilirisasi dan pengembangan ekonomi hijau, melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Sementara dalam jangka pendek difokuskan untuk akselerasi penguatan tiga pilar, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being dan penguatan konvergensi antardaerah;
- c. Menjaga kebutuhan belanja minimum pemerintahan (gaji dan tunjangan, belanja barang dan operasional kantor, belanja wajib yang bersifat mandatory antara lain anggaran pendidikan, anggaran kontrak tahun jamak, dan KPBU-AP);
- d. Mendorong penguatan belanja modal sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi;

- e. Memperkuat harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antara Belanja K/L dan TKD dan antara APBN dan APBD untuk mewujudkan sinergi kebijakan fiskal nasional; dan
- f. Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa yang dapat dipenuhi di dalam negeri berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RPJPD Tahun 2005–2025 khususnya pada tahap V yaitu: Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat di Segala Bidang, yang dicirikan dengan kondisi sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu, akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan;
- 2. Masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi;
- 3. Unggul dalam pengelolaan pertanian dan kelautan;
- 4. Terdepan dalam upaya energi baru dan terbarukan;
- 5. Unggul dalam industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif;
- 6. Infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan; dan
- 7. Pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Berdasarkan Rancangan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026, tema pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sampai 2026 mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan dari periode sebelumnya untuk penormalan pembangunan. Setelah melalui tahap pemulihan selama beberapa tahun terakhir sejak pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap terpuruknya kondisi sosial ekonomi, maka Provinsi Jawa Barat pada periode Tahun 2024-2026 memasuki tahap penormalan. Tiga tahun kedepan, diharapkan terwujud

kondisi yang normal seperti sebelum pandemi. Penormalan ditandai dengan meningkatnya daya saing SDM, pembangunan ekonomi berkualitas, pemerataan pengembangan wilayah yang didukung infrastruktur yang berkualitas.

Pembangunan tahun 2025 dengan tema pemerataan pembangunan untuk mendukung kemandirian masyarakat Jawa Barat diarahkan untuk melanjutkan fokus pembangunan tahun sebelumnya dengan lebih meningkatkan intensitas dan memperluas cakupan khususnya pada daerah-daerah yang belum optimal mendapatkan pelayanan dan yang memiliki nilai strategis tinggi. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan keunggulan masyarakat Jawa Barat. Pengembangan ekonomi diarahkan pada sektor-sektor unggulan seperti industri manufaktur dan jasa; pariwisata dan ekonomi kreatif; dan pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Sektor-sektor unggulan tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal, serta memberikan dampak ikutan bagi berkembangnya sektor-sektor lainnya. Berkembangnya perekonomian daerah yang dibarengi dengan meningkatnya produktivitas daerah terutama diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem dan pengangguran. Kualitas dan jangkauan infrastruktur yang andal terus menjadi perhatian pemerintah pada tahun ini, dan diharapkan mendorong daya saing daerah dan berdampak positif bagi investasi daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai. Visi Kabupaten Tasikmalaya dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**, untuk mendukung visi tersebut maka ditetapkan 4 misi . BPKPD selaku

perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung misi ke-2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional**, dengan tujuan daerah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dan sasaran daerah meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dengan memperhatikan faktor-faktor penentu dan bersifat idealistik mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan organisasi berdasarkan kriteria yang mudah dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah “**Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima**”. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai fungsi penunjang pemerintahan dalam melakukan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Tema atau arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yaitu “Pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing dan inovasi daerah” yang didukung oleh Prioritas Pembangunan Daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ,meliputi:

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting;
3. Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan;
7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
8. Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peningkatan Kemandirian Desa

Terdapat 4 (empat) isu besar pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya, adanya transisi dokumen perencanaan (RPJPD Tahun 2025 -2045 dan RPJMD Tahun 2025–2029), Implementasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat pelatihan Kepala Daerah serta merupakan momentum puncak pertumbuhan ekonomi pasca pandemi *Covid-19*. Sejalan dengan Isu besar pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka isu strategis BPKPD yaitu mengenai Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Sehingga arah kebijakan BPKPD untuk menghadapi isu strategis tersebut yaitu melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Selanjutnya tujuan dan sasaran dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan melalui indikator kinerja beserta targetnya. Terdapat perubahan target indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 nilai RB BPKPD jauh melampaui target yang telah ditetapkan dan telah

mencapai sebesar 78,07. Capaian tersebut juga telah melampaui target pada tahun 2024, maka pada tahun 2024 BPKPD melakukan reviu terhadap IKU BPKPD untuk menetapkan target RB tahun 2024 – 2026. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah melaksanakan tugas fungsi penyelenggaraan pemerintahan di BPKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah tujuan, sasaran, indikator dan target Tahun 2025.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2				Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3				Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan
4				Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Sumber : Renstra BPKPD tahun 2021-2026

Tabel 3.2
Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja PD Tahun 2025
1	Meningkatnya tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80

Sumber : *Renstra BPKPD Tahun 2021-2026*

Tabel 3.3
Sasaran Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Indikator Sasaran PD Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	78,50
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	89
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	5,24

Sumber : *Renstra BPKPD Tahun 2021-2026*

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	78,50
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	89
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	5,24

Sumber : *Renstra BPKPD Tahun 2021-2026*

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BPKPD Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala BPKPD Kabupaten Tasikmalaya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati. Pada Tahun 2025 BPKPD berfokus pada Optimalisasi PAD melalui Implementasi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan BPKPD tidak hanya mendukung pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya saja, namun harus sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's). SDG's merupakan sebuah program pembangunan dunia yang mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan terdapat 17 faktor utama sebagaimana tercapainya 169 target yang telah ditentukan dalam waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini tujuan BPKPD sejalan dengan tujuan SDG's khususnya pada tujuan nomor 16 dan 17. Tujuan 16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*peace*) untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif akuntable dan inklusif di semua level serta tujuan 17 yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, usulan program kegiatan dan sub kegiatan juga harus mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi, strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai suatu keadilan gender sesuai dengan instruksi

Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Tujuan dari PUG adalah memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan telah setara dan adil bagi laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya. Sehingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan harus memperhatikan aspek dalam mendukung PUG tersebut.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Bupati Tasikmalaya. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya memiliki fungsi penunjang urusan keuangan, pendapatan dan aset daerah namun juga berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat kegiatan yang merupakan unsur PPKD yaitu kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2025 BPKPD direncanakan melaksanakan 4 program 13 kegiatan dan 69 Sub Kegiatan dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 824.825.192.160,00 yang terdiri dari belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD sebesar Rp. 25416.021.039,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp. 769.115.986.530,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp. 30.293.184.591,00. Berikut rekapitulasi sasaran

dan program/kegiatan/sub kegiatan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
I		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
III		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
I		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
3		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1		Penyediaan Komponen Instalasi
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7		Fasilitasi Kunjungan Tamu
8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
V		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2		Pengadaan Mebel
3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
I		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
6		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
9		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
10		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
11		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
II		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
3		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
4		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
5		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
III		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
3		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
6		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
7		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
8		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
IV		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
C	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
I		Pengelolaan Barang Milik Daerah
1		Penyusunan Standar Harga
2		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3		Pengamanan Barang Milik Daerah
4		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
6		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
D	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
I		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
6		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
9		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
10		Penagihan Pajak Daerah
11		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
12		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sumber : BPKPD, diolah

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2025

Kode					Prioritas Pembangunan	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Ket.
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah							824.825.192.160	
5	02	01	2.01	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.303.499.630	
5	02	01	2.01	-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233.000.000	
5	02	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	173.000.000	
5	02	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	
5	02	01	2.02	-		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.416.021.039	
5	02	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.416.021.039	
5	02	01	2.05	-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	651.717.800	
5	02	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87.425.800	
5	02	01	2.05	0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	169.292.000	
5	02	01	2.05	0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	395.000.000	
5	02	01	2.06	-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.696.417.608	
5	02	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi	30.001.000	
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
5	02	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	640.084.580	

5	02	01	2.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.997.603	
5	02	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.000.000	
5	02	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	710.017.400	
5	02	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	
5	02	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	328.000.000	
5	02	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	488.165.025	
5	02	01	2.06	0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60.152.000	
5	02	01	2.07	-		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.173.899.900	
5	02	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.004.380.000	
5	02	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel	431.690.000	
5	02	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	737.829.900	
5	02	01	2.08	-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.689.010.000	
5	02	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	926.010.000	
5	02	01	2.08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.000.000	
5	02	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	675.000.000	
5	02	01	2.09	-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.443.433.283	
5	02	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	799.990.000	
5	02	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	404.118.483	
5	02	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.239.324.800	
5	02	02	-	-		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	773.153.342.530	
5	02	02	2.01	-		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.323.356.000	
5	02	02	2.01	0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	104.500.000	
5	02	02	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	104.500.000	
5	02	02	2.01	0003		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	80.000.000	
5	02	02	2.01	0004		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.000.000	

5	02	02	2.01	0005		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	72.500.000	
5	02	02	2.01	0006		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	76.000.000	
5	02	02	2.01	0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	220.000.000	
5	02	02	2.01	0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	220.000.000	
5	02	02	2.01	0009		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	386.770.000	
5	02	02	2.01	0011		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	586.394.000	
5	02	02	2.01	0013		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	392.692.000	
5	02	02	2.02	-		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	622.000.000	
5	02	02	2.02	0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	55.000.000	
5	02	02	2.02	0003		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	57.000.000	
5	02	02	2.02	0005		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	220.000.000	
5	02	02	2.02	0006		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	110.000.000	
5	02	02	2.02	0009		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	180.000.000	
5	02	02	2.03	-		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.092.000.000	
5	02	02	2.03	0002		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	173.000.000	
5	02	02	2.03	0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	121.000.000	
5	02	02	2.03	0004		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	172.000.000	

5	02	02	2.03	0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	234.000.000	
5	02	02	2.03	0009		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	110.000.000	
5	02	02	2.03	1000		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	98.000.000	
5	02	02	2.03	0011		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	92.000.000	
5	02	02	2.03	0012		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	92.000.000	
5	02	02	2.04	-		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	769.115.986.530	
5	02	02	2.04	0008		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	720.596.737.300	
5	02	02	2.04	0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	34.604.859.391	
5	02	02	2.04	0010		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.914.389.839	
5	02	03	-	-		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.767.400.000	
5	02	03	2.01	-		Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.767.400.000	
5	02	03	2.01	0001		Penyusunan Standar Harga	140.000.000	
5	02	03	2.01	0003		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	60.000.000	
5	02	03	2.01	0007		Pengamanan Barang Milik Daerah	768.700.000	
5	02	03	2.01	0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.388.700.000	
5	02	03	2.01	0011		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	285.000.000	
5	02	03	2.01	0013		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	125.000.000	
5	02	04	-	-		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	13.600.950.000	

5	02	04	2.01	-		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.600.950.000	
5	02	04	2.01	0001		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	241.000.000	
5	02	04	2.01	0002		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	143.960.000	
5	02	04	2.01	0003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	742.790.000	
5	02	04	2.01	0004		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2.353.000.000	
5	02	04	2.01	0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.125.000.000	
5	02	04	2.01	0006		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	300.000.000	
5	02	04	2.01	0007		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.820.000.000	
5	02	04	2.01	0009		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	875.000.000	
5	02	04	2.01	0010		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	125.000.000	
5	02	04	2.01	0011		Penagihan Pajak Daerah	1.400.000.000	
5	02	04	2.01	0013		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.175.200.000	
5	02	04	2.01	0015		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	300.000.000	
Jumlah							824.825.192.160	

Sumber : *BPKPD, diolah*

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tasikmalaya

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya																				
Kode					Urusan /Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Unit Penanggu ng Jawab	
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya														824.825.192.160	APBD				901.475.939.647	
5	02	01	2.01	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah			Desa Sukaasih Kec. Singaparna	83 Poin			25.649.021.039	APBD		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	84 Poin	30.689.225.246	Sekretariat	
-	-	-	-	-	-	Nilai IKM Perangkat Daerah				87 Poin			9.654.478.591	APBD		Nilai IKM Perangkat Daerah	87,25 Poin	7.963.960.218	Sekretariat	
5	02	01	2.01	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna			101 Dokumen	233.000.000	APBD		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98 Dokumen	190.000.000	Sekretariat	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		29 Dokumen		173.000.000	APBD		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen	125.000.000	Sekretariat	

5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		72 Laporan		60.000.000	APBD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72 Laporan	65.000.000	Sekretariat
5	02	01	2.02	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Laporan Pertanggungja waban Keuangan yang Sesuai Aturan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna			100 %	25.416.021.039	APBD		Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100 %	30.499.225.246	Sekretariat
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		97 Orang/bulan		25.416.021.039	APBD		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/bul an	30.499.225.246	Sekretariat
5	02	01	2.05	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna			100 %	651.717.800	APBD		Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100 %	707.609.000	Sekretariat
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		2 Paket		87.425.800	APBD		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	92.609.000	Sekretariat
5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		4 Dokumen		169.292.000	APBD		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	220.000.000	Sekretariat
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		153 Orang		395.000.000	APBD		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	153 Orang	395.000.000	Sekretariat
5	02	01	2.06	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Desa Sukaasih Kec. Singaparna			100 %	2.696.417.608	APBD		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	2.982.557.848	Sekretariat

5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		1 Paket		30.001.000	APBD		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.000.000	Sekretariat
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		3 Paket		640.084.580	APBD		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	704.093.280	Sekretariat
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		1 Paket		39.997.603	APBD		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	43.996.700	Sekretariat
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		1 Paket		350.000.000	APBD		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	385.000.000	Sekretariat
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		1 Paket		710.017.400	APBD		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	836.186.340	Sekretariat
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		4 Dokumen		50.000.000	APBD		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	55.000.000	Sekretariat
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		4 Laporan		328.000.000	APBD		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	360.800.000	Sekretariat
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		4 Laporan		488.165.025	APBD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	536.981.528	Sekretariat

5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		1 Dokumen		60.152.000	APBD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	27.500.000	Sekretariat
5	02	01	2.07	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna		100 %		2.173.899.900	APBD		Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100 %	667.020.090	Sekretariat
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		1 Unit		1.004.380.000	APBD		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Sekretariat
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		1 Unit		431.690.000	APBD		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	89.859.000	Sekretariat
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		13 Unit		737.829.900	APBD		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	577.161.090	Sekretariat
5	02	01	2.08	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna		100 %		1.689.010.000	APBD		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.857.900.000	Sekretariat
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		12 Laporan		926.010.000	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.018.600.000	Sekretariat
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		1 Laporan		88.000.000	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	96.800.000	Sekretariat

5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		12 Laporan		675.000.000	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	742.500.000	Sekretariat
5	02	01	2.09	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna		100 %	2.443.433.283	APBD		Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.748.873.280	Sekretariat	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		70 Unit		799.990.000	APBD		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	879.989.000	Sekretariat
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		143 Unit		404.118.483	APBD		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	143 Unit	440.000.000	Sekretariat
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		3 Unit		1.239.324.800	APBD		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	428.884.280	Sekretariat
5	02	02	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah			Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100 %			773.153.342.530	APBD		Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	850.524.609.183	Anggaran, Perbendaharaan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	-	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna		100 %	2.323.356.000	APBD		Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	2.439.524.000	Anggaran	

5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		1 Dokumen		104.500.000	APBD		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	109.725.000	Anggaran
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		1 Dokumen		104.500.000	APBD		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	109.725.000	Anggaran
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		59 Dokumen		80.000.000	APBD		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	84.000.000	Anggaran
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		59 Dokumen		80.000.000	APBD		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	84.000.000	Anggaran
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		59 Dokumen		72.500.000	APBD		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	76.125.000	Anggaran
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		59 Dokumen		76.000.000	APBD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	79.800.000	Anggaran
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		2 Dokumen		220.000.000	APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	231.000.000	Anggaran
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		2 Dokumen		220.000.000	APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	231.000.000	Anggaran

5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		5 Dokumen		386.770.000	APBD		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	406.108.500	Anggaran
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		1 Dokumen		586.394.000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	615.713.700	Anggaran
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		318 Orang		392.692.000	APBD		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	318 Orang	412.326.800	Anggaran
5	02	02	2.02	-	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna			100 %	622.000.000	APBD		Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	668.500.000	Perbendaharaan
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		12 Dokumen		55.000.000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	60.500.000	Perbendaharaan
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		236 Dokumen		57.000.000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	236 Dokumen	62.700.000	Perbendaharaan

5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		12 Dokumen		220.000.000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	233.200.000	Perbendaharaan
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		2 Dokumen		110.000.000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	117.700.000	Perbendaharaan
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		12 Dokumen		180.000.000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	194.400.000	Perbendaharaan
5	02	02	2.03	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		100 %		1.092.000.000	APBD		Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	1.389.000.000	Akuntansi dan Pelaporan

5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		16 Dokumen		173.000.000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen	208.000.000	Akuntansi dan Pelaporan
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		16 Laporan		121.000.000	APBD		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	16 Laporan	145.000.000	Akuntansi dan Pelaporan
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		3 Laporan		172.000.000	APBD		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	225.000.000	Akuntansi dan Pelaporan
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		2 Dokumen		234.000.000	APBD		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	305.000.000	Akuntansi dan Pelaporan

5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		2 Dokumen		110.000.000	APBD		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	143.000.000	Akuntansi dan Pelaporan
5	02	02	2.03	1000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		1 Dokumen		98.000.000	APBD		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	127.000.000	Akuntansi dan Pelaporan
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawabana Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		128 Orang		92.000.000	APBD		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	128 Orang	118.000.000	Akuntansi dan Pelaporan
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		41 Lembaga		92.000.000	APBD		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	41 Lembaga	118.000.000	Akuntansi dan Pelaporan
5	02	02	2.04	-	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Persentase Fasilitas Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya			100 %	769.115.986.530	APBD		Persentase Fasilitas Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	846.027.585.183	Perbendaharaan
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Kabupaten Tasikmalaya		12 Laporan		720.596.737.300	APBD		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	792.656.411.030	Perbendaharaan
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Kabupaten Tasikmalaya		1 Laporan		34.604.859.391	APBD		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	38.065.345.330	Perbendaharaan

5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		Kabupaten Tasikmalaya		1 Laporan		13.914.389.839	APBD		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.305.828.823	Perbendaharaan
5	02	03	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan			Kabupaten Tasikmalaya	89 %			2.767.400.000	APBD		Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	89 %	1.797.400.000	Aset Daerah
5	02	03	2.01	-	Pengelolaan Barang Milik Daerah			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya			100 %	2.767.400.000	APBD		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	1.797.400.000	Aset Daerah
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		2 Dokumen		140.000.000	APBD		Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	140.000.000	Aset Daerah
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		2 Dokumen		60.000.000	APBD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	60.000.000	Aset Daerah
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		Kabupaten Tasikmalaya		4 Laporan		768.700.000	APBD		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	768.700.000	Aset Daerah
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Kabupaten Tasikmalaya		2 Dokumen		1.388.700.000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	418.700.000	Aset Daerah

5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		12 Laporan		285.000.000	APBD		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	285.000.000	Aset Daerah
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		59 Orang		125.000.000	APBD		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	59 Orang	125.000.000	Aset Daerah
5	02	04	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah			Kabupaten Tasikmalaya	100 %			13.600.950.000	APBD		Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100 %	10.500.745.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD serta Bidang Pelayanan Pajak Daerah
5	02	04	2.01	-	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya			100 %	13.600.950.000	APBD		Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100 %	10.500.745.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD serta Bidang Pelayanan Pajak Daerah
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		1 Dokumen		241.000.000	APBD		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	400.070.000	Perencanaan dan Pengembangan PAD
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		1 Dokumen		143.960.000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	832.425.000	Perencanaan dan Pengembangan PAD

5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Kabupaten Tasikmalaya		4 Laporan		742.790.000	APBD		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	151.250.000	Perencanaan dan Pengembangan PAD
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		10 Unit		2.353.000.000	APBD		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	2.113.000.000	Pelayanan Pajak Daerah
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Kabupaten Tasikmalaya		2 Laporan		1.125.000.000	APBD		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	599.500.000	Perencanaan dan Pengembangan PAD
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		2 Laporan		300.000.000	APBD		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	242.000.000	Perencanaan dan Pengembangan PAD
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		Kabupaten Tasikmalaya		376.400 Obyek Pajak		4.820.000.000	APBD		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	376.400 Obyek Pajak	2.722.500.000	Perencanaan dan Pengembangan PAD
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		1 Layanan		875.000.000	APBD		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	755.000.000	Pelayanan Pajak Daerah
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		12 Dokumen		125.000.000	APBD		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	170.000.000	Pelayanan Pajak Daerah

5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		Kabupaten Tasikmalaya		12 Dokumen		1.400.000.000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	975.000.000	Pelayanan Pajak Daerah
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		4 Dokumen		1.175.200.000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	1.210.000.000	Perencanaan dan Pengembangan PAD
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna		1 Laporan		300.000.000	APBD		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	330.000.000	Perencanaan dan Pengembangan PAD
Jumlah													824.825.192.160					901.475.939.647	

Sumber : *BPKPD, diolah*

BAB V PENUTUP

Pada tahun 2025 merupakan tahun transisi, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengusulkan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2025 untuk Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi struktural untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan penjabaran dari proses perencanaan kegiatan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Perencanaan yang ditetapkan oleh BPKPD dituntut untuk dapat mendukung pencapaian VISI MISI Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Untuk dapat mendukung pencapaian tersebut, maka disusun dokumen Rencana Kerja (Renja) yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja selama satu tahun berjalan. Renja ini mengacu kepada RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Rencana Kerja dijadikan sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi BPKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Dengan demikian, diharapkan penyusunan Renja dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berjalan dengan baik, dan juga dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tasikmalaya di tahun yang akan datang. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat tergantung kepada kerjasama dan dukungan serta komitmen dari seluruh komponen. Kami menyadari

bahwa dalam penyusunan Renja ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga diharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk Renja BPKPD yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Tasikmalaya, 29 Juli 2024
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003